

PERSPEKTIF KEBIJAKAN BERBASIS BUKTI TERHADAP IMPLEMENTASI KEBIJAKAN MERDEKA BELAJAR KAMPUS MERDEKA

EVIDENCE-BASED POLICY PERSPECTIVE ON IMPLEMENTATION OF FREEDOM TO LEARN INDEPENDENT CAMPUS POLICY

Denny Hernawan^{1*}, Gotfridus Goris Seran², Irma Purnamasari³, Agustina Multi Purnomo⁴, Afmi Apriliani⁵

^{1,2,3,5}Program Studi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Djuanda, Jl. Tol Ciawi No. 1, Kotak Pos 35, Ciawi, Bogor, Jawa Barat 16720

⁴Program Studi Sains Komunikasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Djuanda, Jl. Tol Ciawi No. 1, Kotak Pos 35, Ciawi, Bogor, Jawa Barat 16720

*Korespondensi: Denny Hernawan. Email: denny.hernawan@unida.ac.id

(Diterima: 20-12-2021; Ditelaah: 24-12-2021; Disetujui: 30-12-2021)

ABSTRACT

For a university there is important to find out the effectiveness and to describe the implementation of freedom to learn independent campus (MBKM) policy in order to continually improve. Based on the perspective of evidence-based policy, the survey is conducted to obtain the evidences of two implementers of MBKM policy, namely provider (lecturer and administrative staff) and user (student). From provider's perspective, results of the survey indicate the high level of provider's involvement in implementing MBKM, starting from contribution to prepare MBKM through discussion/meeting/workshop to actively motivating students to participate in MBKM. The implementation of MBKM policy positively impacts on both student learning, improving student hard and soft skills, and improving lecturer capacity. From user's perspective, results of the survey indicate student's evaluation that the off-campus learning positively impacts on improving competence and widening perspective of student. The student also evaluates MBKM program in accordance with the need of graduate at future and the improvement of student soft skill. However, the survey identifies three main constraints in implementing MBKM policy, namely curriculum revision, redesign of academic information system, and fund problem for student.

Key words: Evidence-Based Policy, Freedom to Learn Independent Campus, Policy Implementation.

ABSTRAK

Bagi perguruan tinggi penting untuk mengetahui efektivitas dan mendapatkan gambaran implementasi kebijakan MBKM guna memperbaiki kinerja secara berkelanjutan. Berdasarkan perspektif kebijakan berbasis bukti, survei dilakukan untuk mendapatkan bukti dari dua implementer kebijakan MBKM, yaitu *provider* (pendidik dan tenaga kependidikan) dan *user* (mahasiswa). Dari perspektif *provider*, hasil survei menunjukkan tingkat keterlibatan *provider* yang cukup tinggi dalam implementasi MBKM, mulai dari kontribusi dalam diskusi/rapat/workshop persiapan MBKM hingga aktif mendorong mahasiswa untuk mengikuti MBKM. Implementasi kebijakan MBKM berdampak positif terhadap pembelajaran mahasiswa, peningkatan *hard skill* dan *soft skill* mahasiswa, maupun peningkatan kapasitas dosen. Dari perspektif *user*, hasil survei menunjukkan penilaian mahasiswa bahwa pembelajaran di luar kampus berdampak positif terhadap peningkatan kompetensi dan perluasan wawasan mahasiswa. Mahasiswa juga menilai adanya kesesuaian kegiatan MBKM dengan kebutuhan lulusan di masa mendatang dan adanya peningkatan *soft skill* mahasiswa. Namun demikian, survei mengidentifikasi tiga hambatan utama dalam implementasi kebijakan MBKM, yaitu penyesuaian kurikulum, penyesuaian sistem informasi akademik, dan masalah pendanaan bagi mahasiswa.

Kata kunci: Implementasi Kebijakan, Kebijakan Berbasis Bukti, Merdeka Belajar Kampus Merdeka.

PENDAHULUAN

Perguruan tinggi dalam menyelenggarakan pendidikan tinggi secara yuridis formal harus merujuk kepada Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN-Dikti) sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tanggal 24 Januari 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. Khusus terkait ketentuan dalam Pasal 18 Ayat (3) telah dioperasionalkan lebih lanjut dalam bentuk “kebijakan Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM)”. Untuk kepentingan pelaksanaannya, maka Panduan MBKM telah diterbitkan berupa dokumen Buku Panduan Merdeka Belajar Kampus Merdeka oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2020.

Bagi perguruan tinggi pelaksana yang terlibat dalam kegiatan MBKM (termasuk Universitas Djuanda) menjadi penting untuk mengetahui seberapa efektif implementasi kegiatan MBKM yang dilakukan di lingkungan Universitas bukan hanya untuk mengetahui tingkat keefektifannya, tetapi juga penting untuk mendapatkan gambaran tentang apa yang seharusnya dilakukan oleh pihak Universitas dalam memperbaiki kinerja kegiatan MBKM dalam konteks perbaikan berkelanjutan (*continual improvement*). Untuk kepentingan tersebut, pihak Universitas telah melakukan kegiatan survei di lingkungan kampus dengan sasaran dua kelompok penting yang terlibat dalam kegiatan MBKM, yaitu kelompok *provider* (pendidik dan tenaga kependidikan) dan kelompok *user* (mahasiswa).

Perspektif dari kedua kelompok, baik *provider* maupun *user*, tersebut dinilai penting untuk mendapatkan gambaran tentang bagaimana kedua kelompok menilai keberadaan dan dampak dari implementasi kebijakan MBKM di lingkungan Universitas sehingga ke depan dapat dirumuskan upaya perbaikannya. Dari kegiatan survei tersebut dapat diperoleh sejumlah data yang dapat dijadikan sebagai bukti (*evidences*) yang

mendasari pembuat kebijakan (dalam hal ini Rektor) untuk merumuskan rencana tindak lanjut yang berorientasi pada perbaikan berkelanjutan (*continual improvement*). Dalam konteks inilah penting untuk melewatkan perspektif kebijakan berbasis bukti (*evidence-based policy*) dalam implementasi kebijakan MBKM, khususnya di lingkungan FISIP Universitas Djuanda Bogor.

MATERI DAN METODE

Kebijakan Berbasis Bukti

Kebijakan (*policy*) didefinisikan sebagai pernyataan umum tentang suatu tujuan, sasaran, dan kriteria untuk memilih beberapa alternatif dan memberi pengarahan (Handoyo, 2009). Kebijakan memiliki peranan yang penting, mengingat dampak yang diperoleh akibat diputuskannya suatu kebijakan. Oleh karena itu, setiap kebijakan yang disusun harus memerhatikan banyak aspek dalam pengambilan keputusannya. Keputusan yang telah tertuang dalam kebijakan akan lebih baik jika disertakan bukti yang mendukung (Budi dan Fauzela, 2020).

Bukti (*evidence*) didefinisikan sebagai pendekatan modern rasional yang dapat memecahkan masalah dengan fokus pada diagnosis dan pengetahuan yang akurat dari hubungan sebab akibat (Pawson, 2006). Bukti merupakan aspirasi untuk menghasilkan pengetahuan yang dibutuhkan untuk menyesuaikan secara baik suatu program dan merancang panduan/arahan guna mengatasi masalah-masalah yang diketahui (Head, 2008). Bukti dapat didefinisikan sebagai suatu informasi yang memiliki tingkat akurasi yang tinggi dan di dalam pemanfaatannya kebenarannya dapat dipertanggungjawabkan. Bukti tidak hanya berasal dari kajian empiris/studi/riset ilmiah saja, melainkan juga memperluas makna tersebut sebagai pernyataan/masukan/pendapat dari para ahli/pakar di bidang masing-masing, baik yang berasal dari akademisi/perguruan tinggi, lembaga riset, perusahaan, maupun unit lain yang telah memiliki keahlian di bidang tertentu.

Dengan demikian, kebijakan berbasis bukti dapat didefinisikan sebagai suatu kebijakan yang mendasarkan pada bukti (informasi aktual, hasil riset, dan temuan-temuan lain yang kredibel, terkini, dan jelas) sebagai salah satu bagian utama dalam proses pembuatan kebijakan dan menjadi input yang berharga bagi para pembuat kebijakan (Asmara dan Handoyo, 2015).

Kebijakan berbasis bukti (*evidence-based policy*) menggunakan penelitian dan informasi terbaik yang tersedia mengenai hasil program untuk membuat keputusan di semua tahapan proses kebijakan dan di setiap cabang pemerintahan. Kebijakan yang terjadi pada berbagai tahap dan berkembang dari waktu ke waktu untuk merespons dan mengatasi masalah yang ada dalam implementasinya. Menurut Sanderson (2002), penekanan lebih harus diberikan pada pengembangan basis bukti yang kuat untuk kebijakan melalui evaluasi dampak jangka panjang dari kebijakan dan program. Sementara itu, Krizek (2010) mengemukakan bahwa praktik berbasis bukti mengusulkan hubungan yang lebih baik antara penelitian dan pengambil kebijakan, tetapi juga berpotensi menimbulkan beberapa kekhawatiran tentang jenis bukti, kekuatan dan kejelasan penelitian dalam perencanaan, dan ketidaksetaraan sumber daya untuk mengintegrasikan penelitian ke dalam perencanaan (Ramadanti, 2019).

Perkembangan kebijakan dari waktu ke waktu menuntut keberadaan bukti untuk melengkapi perubahan kebijakan. Secara spesifik, Turner (2013) menyatakan bahwa bukti diperlukan oleh pembuat kebijakan dalam rangka: (a) membantu mereka untuk mendiagnosa masalah dan sebab-sebab pokok; (b) mendesain opsi kebijakan dan akses yang mungkin bagi pemberian alternatif lain; (c) menunjukkan dan mengevaluasi dampak dari modal dan program baru; (d) memonitor implementasi program, mengukur biaya dan kinerja dan sensitivitas mereka ke setting berbeda;

serta (e) mengevaluasi dampak jangka panjang dan biaya keefektifan program-program yang ada (Budi dan Fauzela, 2020).

Secara hakiki, proses pembelajaran dalam Kampus Merdeka merupakan salah satu perwujudan pembelajaran yang berpusat pada mahasiswa (*student-centered learning*) yang sangat esensial. Pembelajaran dalam Kampus Merdeka memberikan tantangan dan kesempatan untuk pengembangan inovasi, kreativitas, kapasitas, kepribadian, dan kebutuhan mahasiswa, serta mengembangkan kemandirian dalam mencari dan menemukan pengetahuan melalui kenyataan dan dinamika lapangan seperti persyaratan kemampuan, permasalahan riil, interaksi sosial, kolaborasi, manajemen diri, tuntutan kinerja, target dan pencapaiannya. Melalui program Merdeka Belajar yang dirancang dan diimplementasikan dengan baik, maka *hard skills* dan *soft skills* mahasiswa akan terbentuk dengan kuat.

Adapun tujuan kebijakan Merdeka Belajar adalah untuk meningkatkan kompetensi lulusan, baik *soft skills* maupun *hard skills*, agar lebih siap dan relevan dengan kebutuhan zaman, menyiapkan lulusan sebagai pemimpin masa depan bangsa yang unggul dan berkepribadian. Program-program *experiential learning* dengan jalur yang fleksibel diharapkan akan dapat memfasilitasi mahasiswa mengembangkan potensinya sesuai dengan *passion* dan bakatnya.

Metode Penelitian

Fokus dari penelitian ini adalah implementasi kebijakan MBKM berdasarkan perspektif *provider* (pendidik dan tenaga kependidikan) dan perspektif *user* (mahasiswa) di lingkungan FISIP Universitas Djuanda Bogor. Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif-analitis dengan cara mendeskripsikan sejumlah bukti atau data yang terkait dengan aspek atau atribut implementasi kebijakan MBKM. Bukti atau data yang

dikumpulkan dideskripsikan dan kemudian dianalisis secara kualitatif untuk keperluan inferensi atau simpulan. Untuk kepentingan tersebut, maka digunakan metode survei dengan responden pada kedua kelompok yang akan dianalisis, yaitu *provider* dan *user*. Survei dilakukan selama periode minggu ke-2 sampai dengan minggu ke-3 bulan Desember 2021. Secara spesifik, yang menjadi responden dalam kegiatan ini adalah pihak *provider* dan *user* kebijakan MBKM di lingkungan FISIP Universitas Djuanda Bogor.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil survei tentang implementasi kebijakan MBKM di lingkungan FISIP Universitas Djuanda Bogor dibahas berdasarkan perspektif *provider* (pendidik dan tenaga kependidikan) dan perspektif *user* (mahasiswa) sebagai berikut:

Perspektif Pendidik dan Tenaga Kependidikan Tentang Implementasi Kebijakan MBKM

Ada beberapa temuan atau bukti penting terkait bagaimana respons dan penilaian pendidik dan tenaga kependidikan terhadap implementasi kebijakan MBKM di lingkungan FISIP Universitas Djuanda sebagai berikut:

1. Dari aspek kognisi, hampir seluruh responden pendidik dan tenaga kependidikan di lingkungan FISIP (93 persen) menyatakan sebagian besar telah mengetahui tentang kebijakan MBKM. Angka ini jauh di atas rataan tingkat Universitas Djuanda yang hanya 66 persen.
2. Sementara itu, dari sisi lama kegiatan MBKM di luar Universitas Djuanda yang dapat diambil dari kebijakan ini, sebagian besar responden (85 persen) menyatakan 2 sampai 3 semester. Angka ini tidak terpaut jauh dengan angka rataan Universitas Djuanda (82 persen).
3. Dilihat dari aspek sumber informasi tentang kebijakan MBKM, sebagian besar (79 persen) menyatakan berasal dari kegiatan sosialisasi baik yang dilakukan oleh pihak Kemendikbudristek maupun pihak internal Universitas Djuanda. Hal ini menggambarkan efektifnya kegiatan sosialisasi ini sebagai sumber informasi kebijakan.
4. Yang juga menarik adalah fakta bahwa sebagian besar (86 persen) responden mengetahui bahwa Program Studi (Prodi) di lingkungan FISIP juga terdapat program terdahulu yang sesuai dengan bentuk kegiatan MBKM seperti praktek lapang, penelitian, kewirausahaan, dan pertukaran mahasiswa.
5. Selain itu, sebagian besar responden (57 persen) mengetahui bahwa jumlah SKS mata kuliah yang diakui/disetarakan dengan bentuk kegiatan pembelajaran MBKM adalah berkisar di antara 10–20 SKS, sedikit berada di atas angka rataan Universitas Djuanda (52 persen).
6. Terkait dengan pengetahuan responden tentang Perguruan Tinggi sudah memiliki dokumen kebijakan terkait kurikulum yang memfasilitasi Merdeka Belajar Kampus Merdeka, maka seluruh responden (100 persen) menyatakan telah mengetahuinya bahkan responden mengetahui kebijakannya sudah ada dalam bentuk SK Rektor. Angka ini jauh di atas angka rataan Universitas Djuanda (76 persen).
7. Tingkat keterlibatan responden dalam kegiatan untuk penyiapan implementasi MBKM di Prodi atau Perguruan Tinggi juga relatif cukup tinggi dalam bentuk partisipasi sebagai tim untuk mempersiapkan MBKM (29 persen) maupun berkontribusi dalam diskusi/rapat/*workshop* persiapan MBKM (71 persen).
8. Partisipasi aktif responden juga dilakukan dalam bentuk membantu Program Studi menyusun CPL atau

- melakukan perhitungan/penyetaraan SKS (71 persen).
9. Selain itu, yang juga bernilai positif adalah tingkat kesediaan yang sangat tinggi dari dosen untuk menjadi dosen pembimbing dalam kegiatan MBKM (93 persen), paling tinggi di antara Fakultas yang ada di lingkungan Universitas Djuanda.
 10. Hal tersebut juga diikuti dengan keinginan dosen untuk berperan aktif menyarankan/mendorong mahasiswa untuk mengambil kegiatan MBKM (93 persen).
 11. Terkait dengan hal-hal yang perlu dipersiapkan oleh dosen agar implementasi kebijakan MBKM berjalan secara optimal, maka yang perlu diprioritaskan terlebih dahulu adalah menyelaraskan CPL dengan kegiatan dan penilaian (79 persen) dan menyiapkan mata kuliah yang dapat diambil Prodi/PT lain (79 persen). Baru setelah itu perlu dipersiapkan merancang kegiatan bersama Mitra (71 persen).
 12. Sementara itu, bentuk campuran merupakan bentuk mekanisme yang paling banyak dipilih (71 persen) untuk memberikan pengakuan/penyetaraan dan bobot yang ada dalam kurikulum Program Studi.
 13. Sebagian besar responden (57 persen) menyatakan bahwa program MBKM berdampak baik terhadap proses pembelajaran mahasiswa, cukup jauh di atas nilai rata-rata Universitas Djuanda (41 persen).
 14. Sebagian besar responden (64 persen) menyatakan bahwa implementasi program MBKM memberikan peningkatan terhadap *hard skill* dan *soft skill* bagi mahasiswa, dua kali lipat dibanding nilai rata-rata Universitas Djuanda (32 persen).
 15. Sebagian besar responden (64 persen) menyatakan bahwa implementasi program MBKM berperan terhadap peningkatan kapasitas dosen dua kali lipat dibanding nilai rata-rata Universitas Djuanda (32 persen).
 16. Dilihat dari segi manfaat, responden dalam jumlah yang sama (50 persen) menyatakan implementasi MBKM untuk tujuan pemenuhan Capaian Pembelajaran Lulusan termasuk kategori cukup dan sangat bermanfaat.
 17. Melihat dampak dan manfaat yang dirasakan dari implementasi kebijakan MBKM, sebagian terbesar dari responden (93 persen) menyatakan akan merekomendasikan program MBKM agar diikuti mahasiswa di kampus.
 18. Terkait dengan identifikasi faktor hambatan utama dalam memberikan hak bagi Program Studi bebas untuk melakukan penyesuaian kurikulum dan memberikan mahasiswa hak belajar 3 (tiga) semester di luar Prodi, maka ada 3 hambatan utama yang dapat diidentifikasi, yaitu penyesuaian kurikulum (79 persen), penyesuaian sistem informasi akademik (50 persen), dan masalah pendanaan bagi mahasiswa yang akan mengikuti MBKM (36 persen).
- Berdasarkan hasil survei tersebut, maka dari perspektif pendidik dan tenaga kependidikan terhadap implementasi kebijakan MBKM di lingkungan FISIP Universitas Djuanda Bogor, terdapat beberapa temuan penting sebagai berikut:
1. Sebagian besar responden pendidik dan tenaga kependidikan telah memiliki sebagian besar pengetahuan tentang MBKM. Ini merupakan modal dasar yang baik.
 2. Kegiatan sosialisasi (baik yang dilakukan oleh pihak Kemendikbud-ristek maupun Universitas) telah dinilai efektif sebagai sumber informasi kebijakan.
 3. Tingkat keterlibatan responden dalam kegiatan untuk penyiapan implementasi MBKM di Prodi atau Perguruan Tinggi relatif cukup tinggi baik dalam

bentuk partisipasi sebagai tim untuk mempersiapkan, berkontribusi dalam diskusi/rapat/*workshop* persiapan MBKM, membantu Program Studi menyusun CPL atau melakukan perhitungan/penyetaraan SKS, kesediaan yang sangat tinggi dari dosen untuk menjadi dosen pembimbing dalam kegiatan MBKM, bahkan berperan aktif menyarankan/mendorong mahasiswa untuk mengambil kegiatan MBKM.

4. Ada beberapa dampak positif dari implementasi kebijakan MBKM, yaitu proses pembelajaran mahasiswa, peningkatan terhadap *hard skill* dan *soft skill* bagi mahasiswa, maupun peningkatan kapasitas dosen.

Perspektif Mahasiswa Tentang Implementasi Kebijakan MBKM

Ada beberapa temuan atau bukti penting terkait bagaimana respon dan penilaian mahasiswa terhadap implementasi kebijakan MBKM di lingkungan FISIP Universitas Djuanda sebagai berikut:

1. Dari 8 (delapan) bentuk kegiatan pembelajaran di luar Program Studi, sebagaimana Prodi lainnya di lingkungan Universitas Djuanda, mahasiswa Prodi Ilmu Administrasi Publik dan Prodi Sains Komunikasi memilih hampir semua kegiatan yang tersedia kecuali kegiatan asistensi mengajar di satuan pendidikan.
2. Terkait ketersediaan dokumen kurikulum, panduan dan prosedur operasional untuk mengikuti kegiatan MBKM, sebagian besar mahasiswa Prodi Ilmu Administrasi Publik (59 persen) menyatakan bahwa dokumen dimaksud sudah ada. Sedangkan pada Prodi Sains Komunikasi yang menyatakan dokumen sudah tersedia masih sekitar 46 persen, bahkan proporsi yang belum tahu masih cukup besar (38 persen).
3. Namun demikian, pada kedua Prodi di lingkungan FISIP proporsi mahasiswa yang mengetahui MBKM-like pada program terdahulu masih termasuk kategori sebagian besar (67 sampai 81 persen).
4. Terkait dengan kesiapan dan ketertarikan untuk menjadi bagian dari kegiatan MBKM, pada Prodi Ilmu Administrasi Publik proporsi yang sudah siap dan belum siap proporsinya relatif berimbang (masing-masing hampir 50 persen). Hanya saja untuk Prodi Sains Komunikasi menyatakan sebagian besar (lebih dari 50 persen) menyatakan belum siap untuk menjadi bagian dalam kegiatan MBKM.
5. Pilihan sumber informasi untuk kebijakan MBKM di antara kedua Prodi relatif agak berbeda. Bagi mahasiswa Prodi Ilmu Administrasi Publik, dua sumber informasi utamanya (secara berurutan) berasal dari kegiatan sosialisasi luring/daring yang diselenggarakan oleh Perguruan Tinggi dan kanal daring Perguruan Tinggi (laman/*website*, media sosial). Sementara itu, bagi mahasiswa Prodi Sains Komunikasi tiga sumber informasi utamanya (secara berurutan) berasal dari kegiatan kanal daring Perguruan Tinggi (laman/*website*, media sosial), kanal daring Kemendikbud-ristek (laman/*website*, media sosial), dan kegiatan sosialisasi luring/daring yang diselenggarakan oleh Perguruan Tinggi.
6. Hasil survei menunjukkan hasil identifikasi yang relatif sama di antara kedua Prodi terkait apa yang menjadi kekhawatiran mahasiswa ketika melakukan kegiatan pembelajaran di luar kampus. Baik mahasiswa Prodi Ilmu Administrasi Negara maupun mahasiswa Prodi Sains Komunikasi mengidentifikasi tiga kekhawatiran utama (secara berurutan), yaitu biaya ekstra, kurangnya informasi, dan persetujuan orangtua.
7. Hasil survei juga menunjukkan bahwa sebagian besar mahasiswa pada kedua Prodi meyakini bahwa kegiatan pembe-

- lajaran di luar kampus akan memberikan kompetensi tambahan seperti keterampilan dalam menyelesaikan permasalahan nyata yang kompleks, keterampilan dalam menganalisis, etika profesi, dan lain-lain (masing-masing di atas 70 persen).
8. Selain itu, hasil survei juga menunjukkan bahwa sebagian besar mahasiswa (antara 52 sampai 70 persen) menyatakan bahwa kegiatan pembelajaran di luar program studi tetap akan membuat mahasiswa bisa menyelesaikan studinya tepat waktu.
 9. Dari perspektif kompetensi, terungkap juga bahwa sebagian besar mahasiswa pada kedua Prodi (di atas 70 persen) menilai bahwa dengan belajar di program studi lain akan memperluas perspektif dan memberikan kompetensi tambahan yang dibutuhkan.
 10. Sementara itu, dilihat dari segi kesesuaian kegiatan MBKM dengan kebutuhan lulusan di masa mendatang, hasil survei menunjukkan bahwa sebagian besar mahasiswa pada kedua Prodi (masing-masing di atas 80 persen) menilai bahwa kegiatan MBKM telah sesuai dengan kebutuhan lulusan di masa mendatang.
 11. Sedangkan dilihat dari peningkatan *soft skill*, sebagian besar mahasiswa pada kedua Prodi (sekitar 56 sampai 58 persen) menilai setelah mengikuti kegiatan MBKM ada peningkatan cukup baik dalam peningkatan *soft skill*.
 12. Terkait dengan persiapan menghadapi persiapan pasca kelulusan, sebagian besar mahasiswa pada kedua Prodi (masing-masing di atas 80 persen) menilai bahwa kegiatan MBKM memiliki *importancy* (cukup penting dan penting) yang akan mendukung mahasiswa setelah lulus dari perguruan tinggi.
 13. Namun, yang agak perlu menjadi perhatian adalah masih cukup rendahnya pengetahuan mahasiswa terhadap kebijakan MBKM. Survei menunjukkan bahwa mahasiswa Prodi Ilmu Administrasi Negara yang menyatakan mengetahui sedikit saja pengetahuan tentang kebijakan MBKM masih cukup besar (sekitar 40 persen). Angka tersebut ternyata lebih tinggi lagi di Prodi Sains Komunikasi (65 persen). Ini harus menjadi *concern* bersama.
 14. Dari aspek tindaklanjut untuk merekomendasikan pada pihak lain setelah mahasiswa mengikuti kegiatan MBKM, hasil survei menunjukkan bahwa persentase mahasiswa yang sangat tertarik untuk merekomendasikan kegiatan MBKM pada pihak lain relatif masih rendah (sekitar 34 sampai 44 persen).
- Berdasarkan hasil survei tersebut, maka dari perspektif mahasiswa terhadap implementasi kebijakan MBKM di lingkungan FISIP Universitas Djuanda Bogor, terdapat beberapa temuan penting sebagai berikut:
1. Mahasiswa Prodi Ilmu Administrasi Publik dan Prodi Sains Komunikasi memilih hampir semua kegiatan yang tersedia kecuali kegiatan asistensi mengajar di satuan pendidikan.
 2. Pilihan sumber informasi untuk kebijakan MBKM di antara kedua Prodi relatif agak berbeda, dengan mahasiswa Prodi Sains Komunikasi yang memiliki sumber informasi yang lebih variatif ketimbang mahasiswa Prodi Ilmu Administrasi Publik.
 3. Baik mahasiswa Prodi Ilmu Administrasi Negara maupun mahasiswa Prodi Sains Komunikasi mengidentifikasi tiga kekhawatiran utama (secara berurutan), yaitu biaya ekstra, kurangnya informasi, dan persetujuan orangtua.
 4. Dari segi dampak, hasil survei juga menunjukkan bahwa sebagian besar mahasiswa pada kedua Prodi meyakini bahwa kegiatan pembelajaran di luar kampus akan memberikan kompetensi tambahan namun tetap akan membuat

mahasiswa bisa menyelesaikan studinya tepat waktu serta memperluas perspektif.

5. Sebagian besar mahasiswa pada kedua Prodi menilai bahwa kegiatan MBKM telah sesuai dengan kebutuhan lulusan di masa mendatang dan ada peningkatan cukup baik dalam peningkatan *soft skill*.
6. Survei menunjukkan masih cukup rendahnya pengetahuan mahasiswa terhadap kebijakan MBKM.
7. Dorongan mahasiswa untuk merekomendasikan kegiatan MBKM masih rendah.

Hambatan yang Dihadapi

Adapun hambatan-hambatan yang dihadapi dalam implementasi kebijakan MBKM di lingkungan FISIP Universitas Djuanda Bogor sebagai berikut:

1. Ada tiga hambatan utama yang dapat diidentifikasi, yaitu penyesuaian kurikulum, penyesuaian sistem informasi akademik, dan masalah pendanaan bagi mahasiswa yang akan mengikuti MBKM.
2. Implementasi kebijakan MBKM yang efektif memprasyaratkan adanya penyesuaian kurikulum yang akomodatif untuk mencapai tujuan kebijakan MBKM, terutama terkait dengan konversi mata kuliah yang dapat disetarakan dengan kegiatan MBKM yang dipilih mahasiswa. Hal ini menjadi lebih rumit mengingat masing-masing Program Studi di lingkungan FISIP pada tahun 2018 baru saja memberlakukan kurikulum baru.
3. Mengingat di lingkungan Universitas juga telah memiliki sistem informasi akademik sendiri (yang disebut dengan akronim SIAKAD), maka mahasiswa yang akan mengambil kegiatan MBKM akan menempuh prosedur sistem akademik yang berbeda dibanding mahasiswa yang tidak mengambil

MBKM. Hal ini akan memberikan tingkat kerumitan tambahan bagi mahasiswa yang mengambil MBKM. Prosedur sistemik ini akan lebih rumit bila mahasiswa akan mengambil kegiatan Pertukaran Mahasiswa Merdeka (PMM) di perguruan tinggi lain.

4. Pada saat awal kegiatan MBKM, pendanaan untuk melaksanakan kegiatan MBKM yang dipilih mahasiswa bersifat mandiri, tidak ada bantuan dari pemerintah. Dalam kasus di FISIP, pada saat awal implementasi MBKM mahasiswa yang mengambil kegiatan magang di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bogor harus mengeluarkan biaya ekstra untuk kepentingan biaya kost, makan, dan transportasi ke tempat magang.

Selain hambatan utama, ada pula hambatan tambahan yang juga berpengaruh terhadap efektivitas implementasi MBKM yaitu kerjasama mitra. Beberapa kegiatan MBKM, seperti kegiatan magang dan PMM, mempersyaratkan adanya MoU dan MoA agar dapat terlaksana. Bila lembaga yang akan menjadi mitra relatif terbatas, sementara minat mahasiswa untuk mengikuti kegiatan MBKM cukup tinggi, maka hal ini bisa jadi masalah yang menghambat pelaksanaan MBKM. Apalagi di saat pandemi lembaga mitra juga melakukan pembatasan ketat terkait jumlah mahasiswa yang bisa diterima mengikuti program tertentu (seperti kegiatan magang).

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

Kesimpulan

Hasil survei dari perspektif pendidik dan tenaga kependidikan terhadap implementasi kebijakan MBKM di lingkungan FISIP Universitas Djuanda Bogor menyimpulkan temuan sebagai berikut:

1. Sebagian besar responden pendidik dan tenaga kependidikan telah memiliki sebagian besar pengetahuan tentang MBKM. Ini merupakan modal dasar yang baik.

2. Kegiatan sosialisasi (baik yang dilakukan oleh pihak Kemendikbud-ristek maupun Universitas) telah dinilai efektif sebagai sumber informasi kebijakan.
3. Tingkat keterlibatan responden dalam kegiatan untuk penyiapan implementasi MBKM di Program Studi atau Perguruan Tinggi juga relatif cukup tinggi baik dalam bentuk partisipasi sebagai tim untuk mempersiapkan, berkontribusi dalam diskusi/rapat/*workshop* persiapan MBKM, membantu Program Studi menyusun CPL atau melakukan perhitungan/penyetaraan SKS, kesediaan yang sangat tinggi dari dosen untuk menjadi dosen pembimbing dalam kegiatan MBKM, bahkan berperan aktif menyarankan/mendorong mahasiswa untuk mengambil kegiatan MBKM.
4. Ada beberapa dampak positif dari implementasi kebijakan MBKM, yaitu proses pembelajaran mahasiswa, peningkatan terhadap *hard skill* dan *soft skill* bagi mahasiswa, maupun peningkatan kapasitas dosen.

Hasil survei dari perspektif mahasiswa terhadap implementasi kebijakan MBKM di lingkungan FISIP Universitas Djuanda Bogor menyimpulkan temuan sebagai berikut:

1. Dari segi dampak, hasil survei juga menunjukkan bahwa sebagian besar mahasiswa pada kedua Program Studi (Ilmu Administrasi Publik dan Sains Komunikasi) meyakini bahwa kegiatan pembelajaran di luar kampus akan memberikan kompetensi tambahan namun tetap akan membuat mahasiswa bisa menyelesaikan studinya tepat waktu, serta memperluas perspektif.
2. Sebagian besar mahasiswa pada kedua Program Studi (Ilmu Administrasi Publik dan Sains Komunikasi) menilai bahwa kegiatan MBKM telah sesuai dengan kebutuhan lulusan di masa mendatang dan terdapat peningkatan

cukup baik dalam hal peningkatan *soft skill*.

3. Baik mahasiswa Program Studi Ilmu Administrasi Publik maupun mahasiswa Program Studi Sains Komunikasi mengidentifikasi tiga kekhawatiran utama (secara berurutan), yaitu biaya ekstra, kurangnya informasi, dan persekutuan orangtua.

Ada tiga hambatan utama yang dapat diidentifikasi, yaitu penyesuaian kurikulum, penyesuaian sistem informasi akademik, dan masalah pendanaan bagi mahasiswa yang akan mengikuti MBKM. Selain itu, ada juga hambatan tambahan berupa masih belum banyaknya pihak lembaga yang menjadi mitra.

Rekomendasi

Hasil survei tentang implementasi kebijakan MBKM di lingkungan FISIP Universitas Djuanda Bogor merekomendasikan hal-hal sebagai berikut:

1. Agar lebih akomodatif terhadap kegiatan MBKM, pada tahun 2022 akan dilakukan rencana perubahan kurikulum 2018 pada Program Studi Ilmu Administrasi Publik dan Program Studi Sains Komunikasi. Siklus revisi kurikulum setiap minimal 4 tahunan merupakan alternatif yang dinilai memungkinkan.
2. Untuk memperluas alternatif pilihan kegiatan MBKM bagi mahasiswa, maka peningkatan jumlah lembaga mitra akan menjadi prioritas baik lembaga perguruan tinggi, lembaga pemerintah, maupun lembaga swasta (bisnis).
3. Mengingat dampak positif dan manfaat langsung yang dirasakan oleh mahasiswa peserta MBKM, maka penting untuk memperhatikan aspek keberlanjutannya. Untuk itu, kegiatan sosialisasi yang lebih intens dan mencari sumber-sumber pendanaan kegiatan MBKM yang lebih variatif merupakan beberapa hal yang perlu dipertimbangkan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Budi, Adi Asmariadi dan Fauzela, Dian Sera. (2020). "Perancangan Produk Legislasi Berbasis *Soft System Methodology*," dalam: *Prosiding Seminar Nasional Bagian II Pusat Penelitian Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI Kebijakan Berbasis Bukti (Evidence-based Policy) untuk Legislasi DPR RI dan Daya Saing Bangsa*. Jakarta: Pusat Penelitian Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI.

Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. (2020). *Buku Panduan Merdeka Belajar Kampus Merdeka*.

Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. (2020). *Panduan Program Studi Menerapkan Kerja Sama Kurikulum Merdeka Belajar Kampus Merdeka*.

Handoyo, Setiowiji. (2009). *Analisis Kebijakan Inovasi Bagi Pengembangan Bioteknologi di Indonesia*. Jakarta: LIPI Press.

Pawson, Richard. (2006). *Evidence-Based Policy: A Realist Perspective*. CA: Sage Publication.

Turner, M. A. (2013). "Evidence-Based Policymaking Requires A Portfolio of Tools," dalam: Adi Asmariadi Budi dan Dian Sera Fauzela. (2020). "Perancangan Produk Legislasi Berbasis *Soft System Methodology*," dalam: *Prosiding Seminar Nasional Bagian II Pusat Penelitian Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI Kebijakan Berbasis Bukti (Evidence-based Policy) untuk Legislasi DPR RI dan Daya Saing Bangsa*. Jakarta: Pusat Penelitian Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI.

Wahab, Solichin Abdul. (2008). *Analisis Kebijaksanaan: dari Formulasi ke Implementasi Kebijaksanaan Negara*. Jakarta: Bumi Aksara.

Jurnal

Asmara, Anugerah Yuka & Handoyo, Setiowiji. (2015). Pembuatan Kebijakan Berbasis Bukti: Studi pada Proses Pembuatan Kebijakan Standardisasi Alat dan Mesin Pertanian di Indonesia. *STI Policy and Management Journal*, 13(1): 43-64. <http://dx.doi.org/10.14203/STIPM.2015.38>.

Head, Brian W. (2008). Three Lenses of Evidence-Based Policy. *The Australian Journal of Public Administration*, 67(1): 1-11. doi:10.1111/j.1467-8500.2007.00564.x.

Sanderson, Ian. (2002). Evaluation, Policy Learning and Evidence-Based Policy Making. *Public Administration*, 80(1): 1-22. <https://doi.org/10.1111/1467-9299.00292>.

Peraturan Perundang-undangan

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47).

Laman

Ramadanti, Viqra. (2019). Kebijakan Berbasis Bukti (*Based Policy Evidence*) Dalam Perencanaan Pembangunan Di Kota Makassar (Studi Kasus Pada Bappeda Kota Makassar). <http://eprints.unm.ac.id/16536/1/jurnal%20viqra.pdf>.